

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PADI DI DESA PARUMPANAI KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR

Ahmar¹, Mappamiring², Anwar Parawangi³

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government in the empowerment of rice farmers and the determinant factor empowerment of rice farmers in the village Parumpanai Wasuponda Luwu Timur subdistrict. The study used a qualitative approach with descriptive analysis. This study uses a phenomenological type, data collection technique using the instrument in the form of interviews and observations. The results showed that the government's role in the empowerment of rice farmers in the village of Parumpanai already running although not yet fully effective, in addition to the farmers still feel the constraints of aid received assistance mainly seeds and fertilizers that are thought to increase agricultural production. This suggests that the absence of government's efforts to obtain quality seeds and fertilizers that are environmentally friendly affordable to the public in accordance with the conditions of agricultural land in the village of Parumpanai sehingga to increase agricultural production community.

Keywords: *Role of Government, Farmer Empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi dan faktor determinan pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologis, Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai sudah berjalan meskipun sepenuhnya belum efektif, disamping itu petani masih merasakan adanya kendala dari bantuan yang diterima terutama bantuan bibit dan pupuk yang dianggap bisa meningkatkan produksi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintah mendapatkan bibit unggul dan pupuk yang ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan kondisi lahan pertanian di Desa Parumpanai sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian masyarakat.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pemberdayaan Petani*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka sumbangsi yang berpotensi besar dalam pembangunan Nasional adalah bidang pertanian, ditunjukkan oleh sebagian besar pendapatan mereka berasal dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, cara yang banyak dipilih adalah melalui perubahan dan pembaruan dalam sistem usaha tani. Sistem yang sering dilakukan untuk perubahan pertanian adalah memperkenalkan teknologi baru, cara kerja baru dan ide-ide baru di bidang pertanian. Sebagai salah satu contoh, program semacam itu di melalui Dinas Pertanian yang dilaksanakan oleh berbagai fasilitator seperti, Penyuluh Pertanian, GAPOKTAN dan LSM guna membimbing dan mengarahkan petani dalam meningkatkan hasil pertanian dan memandirikan masyarakat.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan Pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan

luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan.

Kendati demikian bahwa pelaksanaan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Hasil yang diperoleh petani dengan lahan (sawah) yang digarap jauh dari apa yang diharapkan. Indikator keberhasilan suatu lahan garapan sawah yang menghasilkan padi perpanennya yang maksimal yaitu 9-10 Ton/Ha.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hasil observasi awal dari penelitian menunjukkan bahwa pertanian di Desa Parumpanai belum mencapai hasil yang maksimal, karena berdasarkan data yang diperoleh dari hasil produksi pertanian petani masih di bawah rata-rata yaitu 3-4 ton/

tahun. Hal ini dipengaruhi kurangnya tingkat SDM petani sehingga belum mampu mengelolah dengan baik lahan dan hasil pertaniannya, Peran tengkulak yang tidak dapat dipungkiri yang menguasai dunia pasar yang memberikan penawaran yang rendah sehingga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kegiatan pertanian semakin menurun, adanya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah, dan belum mantapnya sistem dan pelayanan penyuluh pertanian terhadap kegiatan usaha tani.

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau Fungsi pemberdayaan. Fungsi primer fungsi pemerintah sebagai penyedia *Provider* jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Pertahanan Keamanan (Hankam), layanan sipil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan

pembangunan sarana dan prasarana (Ndraha, 2003:75-76). Searah dengan ungkapan Rasyid (1997:48) dalam jurnal Joni Joko Sarjono dkk (2014: 3) pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2013:61).

Jadi pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Maka agar pendapatan masyarakat meningkat diperlukan peningkatan produktivitas pertanian. Pola pikir seperti ini juga banyak digunakan pada saat orang berusaha mencari sektor kunci dalam pelaksanaan pembangunan, dengan perhitungan bahwa apabila sektor kunci tersebut dapat dikembangkan akan memberikan pengaruh luas bagi perkembangan sektor-sektor lain. Dalam sektor kunci tersebut berbagai sumber daya baik internal maupun eksternal termasuk bantuan internasional lebih banyak disalurkan (Soetomo, 2013: 165).

Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9) Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu: (1) Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu; Pemerintah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). (2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu; Pemerintah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). (3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu; Mencipakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). (4) Peran Pemerintah sebagai Katalisator, yaitu; Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Menurut Siagian (2003:142-150) Peran pemerintah dalam pembangunan Nasional terbagi menjadi lima, yaitu : Peran selaku stabilisator, Peran selaku inovator,

Peran selaku modernisator, Peran selaku pelopor, Peran selaku pelaksana sendiri.

Menurut Ife dalam Isbandi Rukminto Adi (2013:215) peran pelaku perubahan (*change agent*) dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dalam kaitan dengan peran pelaku perubahan dalam diskursus komunias. Dalam diskurs ini, pelaku perubahan memainkan peran sebagai (*Cummuniry worker*) yaitu, sekurang-kurangnya ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah pada teknik dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki seorang *Community worker* sebagai pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Peran dan keterampilan fasilitatif (*Facilitative roles and skill*), (2) Peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skill*), (3) Peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skill*), (4) Peran dan keterampilan teknis (*technical and roles skill*).

Menurut Harsono dalam Jack Mangowal (Jurnal 2013:206-207), kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi menyebabkan kualitas hidup petani kurang diperhatikan. Kebijakan pertanian ternyata menempatkan petani di posisi bawah meskipun petani berperan sebagai pemain utama dalam sektor pertanian.

Dari berbagai penelitian maka ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi pemberdayaan petani: 1) Sikap mental, 2) Modal, 3) Pasar, 4) Kelembagaan, 5) Pendidikan (Jack Mangowal (2013:3-4)).

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Dari bulan September –November 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan pertimbangan bahwa Desa Parumpanai merupakan daerah agraris yang potensial dan corak penduduk merupakan petani khusus petani padi dimana Desa Parumpanai

merupakan salah satu daerah yang memiliki program penyuluhan pertanian dari pemerintah setempat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah tipe penelitian fenomenologis. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Informan penelitian yakni petani, Ketua GAPOKTAN Kepala Desa, Penyuluh, dan Kepala BP3K. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu Mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan faktor determinan pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

Kemiskinan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, sebab hal ini hampir terjadi pada

setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan pada umumnya adalah masih rendahnya tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk, faktor dan kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan yaitu petani pada khususnya adalah pola pikir dan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat tani rata-rata masih rendah.

Permasalahan yang dihadapi petani dalam melaksanakan aktivitas pertanian meyakinkan pemerintah untuk turut serta mengatasi segala permasalahan yang dihadapi petani, dengan berbagai upaya perbaikan yaitu perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan kelembagaan pertanian agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Upaya perbaikan itu mulai terlihat dengan adanya pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat oleh pemerintah di tiap-tiap penjurur masyarakat desa, agar masalah-masalah yang kompleks dapat ditangani dengan baik.

Indikator Peran Pemerintah adalah *Fasilitatory* yaitu Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Fasilitator adalah orang yang menyediakan berbagai fasilitas dalam memperlancar proses komunikasi, inovasi dan menciptakan karya sehingga mampu memahami dan memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyalurkan berbagai bantuan pertanian kepada petani padi di Desa Parumpanai sebagai bentuk perhatian penuh pemerintah terhadap masyarakat di Desa Parumpanai terkhusus para petani. Berbagai sarana dan prasarana pertanian yang

telah disalurkan pemerintah kepada masyarakat yaitu berupa bantuan modal, pupuk, bibit, alat-alat pertanian modern dan lain-lain. Namun itu semua belum mampu mengoptimalkan kondisi lahan pertanian yang ada, karena belum terciptanya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penyuuluhan yang ada.

Peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan pembangunan. Fasilitasi bukan hanya berfokus pada pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana pemberdayaan, serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Dalam upaya mengoptimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator,

pemerintah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana pembangunan, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pelayanan pemberdayaan pertanian yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam pembangunan.

Dinamisator yaitu Pemerintah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Pemerintah sebagai penggerak sangat efektif membangun kegiatan pertanian masyarakat, karena sensitifitas masyarakat dapat mempengaruhi lingkungannya sendiri maka peran pemerintah untuk selalu memberikan motivasi dan bimbingan

sangat dibutuhkan sehingga mampu mempengaruhi masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan mutu hidupnya. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan agar dapat mempengaruhi aktivitas pertanian di masyarakat, sehingga mampu mengubah lingkungan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik yaitu masyarakat yang mandiri dan mampu bersaing di dunia pasar untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan pemerintah memberikan berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada para petani melalui kelembagaan yang ada di masyarakat. Pemerintah harus mampu menjadikan dirinya terus menerus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah yang dinamis adalah pemerintah yang secara demokratis mampu membangkitkan dan menggerakkan komponen dalam dan luarnya aktif dalam usaha-usaha pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai dinamisor telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan guna menunjang keberhasilan aktivitas pertanian di Desa Parumpanai, dengan membentuk kelembagaan pertanian berupa GAPOKTAN, Melalui rapat evaluasi anggota kelompok tani memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani agar aktivitas pertanian masyarakat bisa berjalan baik.

Namun tidak dapat dipungkiri dirasakan masyarakat mulai muncul ketika bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani yaitu pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, karena pembentukan kelompok tani tidak dipisahkan sesuai dengan kebutuhan petani.

Regulator merupakan Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka

efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan di bidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

Peran pemerintah yang paling terasa tentu saja di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha secara keseluruhan, seperti kebijakan moneter/fiskal, perpajakan, tenaga kerja, atau kemudahan persyaratan pendirian usaha baru, atau kebijakan yang berpengaruh terhadap industri tertentu. Melalui

regulasi atau deregulasi pemerintah, peta persaingan bisa berubah dalam sekejap. Industri yang sebelumnya kelihatan menarik, bisa tiba-tiba bermasa depan suram atau industri yang sebelumnya diproteksi tiba-tiba menjadi industri yang menjanjikan potensi persaingan sangat keras.

Tentunya regulasi pada tingkatan pertanian sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pengelolaan kegiatan pertanian masyarakat dalam melakukan terobosan-terobosan baru pada bidang pertanian. Regulasi yang dimaksud untuk kepentingan rakyat banyak bisa menjadi penghambat inovasi bila pemerintah tidak sensitif pada dampak suatu kebijakan yang akan atau telah dibuatnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan aturan tentang kegiatan pemberdayaan pertanian di Desa Parumpanai, terbukti dengan adanya Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang dibentuk di Setiap desa khususnya di Desa Parumpanai untuk menunjang

aktifitas pertanian masyarakat, sehingga memudahkan pemerintah menyalurkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pertanian. Namun untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah masih dirasakan sulit oleh masyarakat dikarenakan adanya aturan pemerintah tentang pembuatan proposal permintaan bantuan dari pemerintah, sementara para petani tidak semuanya mengerti tentang proposal tersebut. Karena harus membuat proposal CPCL, dimana dalam pembuatan CPCL ini memerlukan analisa dan penggunaan teknologi, sehingga masyarakat kesulitan karena tingkat pendidikan yang dimiliki masih di bawah rata-rata dan masih awam dengan teknologi.

Berdasarkan analisis melalui observasi di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai sudah terlihat dengan adanya gabungan kelompok tani dan penyuluhan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberdayakan petani di Desa Parumpanai. Melalui

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dan penyuluh, pemerintah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada masyarakat serta melakukan pelatihan-pelatihan melalui penyuluhan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkemampuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemberdayaan ini tak lepas dari berbagai kendala baik dari pihak masyarakat terlebih oleh pihak pemerintah.

Kendala yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ini, yaitu belum efektifnya irigasi dan pembuangan air lahan pertanian yang dibangun oleh pemerintah, pemilihan bibit unggul yang sesuai lingkungan belum efektif sehingga mempengaruhi hasil produksi pertanian masyarakat. Kendala demikian yang dihadapi pemerintah dalam memberdayakan petani padi di Desa Parumpanai yaitu kurangnya minat petani mengikuti berbagai sosialisasi pertanian, penyuluhan dan pelatihan.

Beberapa hal yang sangat urgen dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tani yaitu: sikap mental, permodalan, pemasaran dan kelembagaan.

Sikap mental merupakan hambatan yang sangat urgen dalam kehidupan petani, para petani akan sulit berkembang secara mandiri kalau tidak mampu merubah sikap mereka. Kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani saat ini dapat dikatakan relatif rendah dimana terdapat sikap petani yang menghambat pembangunan pertanian antara lain; Sebagian besar adalah petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya kemudian luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi, terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan, tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik; infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai, Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (*bargaining position*)

yang sangat lemah dan Ketidakmampuan, kelemahan, atau ketidak tahuan petani sendiri, Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. Selain itu sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, dengan demikian faktor sikap mental perlu mendapatkan perhatian dalam usaha meningkatkan aktivitas usaha tani.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa petani kurang berminat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah apabila belum

mendapatkan bantuan berupa modal, pupuk dan sarana pertanian lainnya, sehingga pemerintah sulit untuk menerapkan berbagai teknik dan cara-cara produksi pertanian yang lebih baru dan moden.

Berdasarkan hasil peneilitian menunjukkan bahwa tingkat SDM petani yang kurang mempengaruhi kurangnya minat petani untuk ikut berbagai sosialisasi dan pelatihan pertanian yang dilakukan pemerintah, Sebenarnya masyarakat petani cukup antusias mengikuti kegiatan pemberdayaan dari pemerintah, namun karena faktor tingkat pendidikan masyarakat petani masih tergolong rendah, sehingga mereka tidak memahami tentang teori-teori pertanian yang disosialisasikan.

Masalah permodalan bagi para petani merupakan hal yang sangat krusial. Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Harapannya, tentuakan terjadi peningkatan produksi dan

produktivitas hasil pertanian yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor lain seperti industri dan jasa. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian, dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satu aspek yang dapat berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan hasil pertanian adalah permodalan, karena rendahnya aspek permodalan akan mempengaruhi tingkat produktivitas bagi usaha tani. Namun dari pengalaman masa lalu banyak kendala yang mempengaruhi pemberian permodalan bagi masyarakat petani di masa lalu, karena kegagalan program pemerintah dalam memberikan paket kredit lunak seperti program KUT, KUD, maupun pemberian permodalan lewat perbankan. Imbasnya adalah kepada petani yang menjadi korban berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pihak perbankan dengan sangat hati-hati dan selektif untuk memberikan permodalan kepada petani kecuali kelayakan usaha tani benar-benar dianggap mandiri,

dengan kata lain para petani harus mengusahakan usaha mereka sendiri baru mendapatkan modalan. Pemberian modal kenyataannya hanya berlaku bagi para petani yang sudah mapan sedangkan petani tradisional jauh dan harapan untuk mendapatkan permodalan, karena berkaitan dengan guna kelayakan usaha. Jadi sangat sulit bagi para petani tradisional untuk bisa mengakses permodalan, kecuali dapat diberikan kemudahan.

Pasar merupakan kunci terakhir dalam pengembangan usaha bagi aktivitas usaha tani, karena apabila tidak tersedianya pasar maka produksi yang dihasilkan oleh para petani tidak akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi keluarga petani. Oleh karena itu pasar akan sangat menentukan kesimbangan usaha tani. Seringkali pemasaran bagi para petani menjadi kendala karena dipengaruhi oleh masalah turunnya harga satuan produksi yang tidak seimbang dengan pendapatan petani,

karena besarnya biaya yang dikeluarkan seperti pupuk, tenaga kerja, bibit maupun biaya-biaya lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum ada campur tangan mengenai pemasaran hasil produksi pertanian petani padi di Desa Parumpanai, baik dari segi sarana pemasaran ataupun dan prasarananya seperti transportasi dan sebagainya, sehingga mempengaruhi kegiatan pertanian yang ada di Desa Parumpanai.

Kelembagaan dalam masyarakat pedesaan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu kala, dengan fungsi utamanya sebagai kelembagaan gotong royong (kerjasama) terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Wadah kelembagaan dimaksud disebut dengan kelompok Tani. Kegiatan kelompok tani merupakan perkumpulan yang beranggotakan para petani desa tersebut, meskipun tidak semua petani di desa tersebut mengikuti kegiatan ini. Ketua kelompok tani

dipilih dan salah seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan luas. Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan pertanian sangat penting demi terciptanya program pemerintah yang efektif dan efisien dalam hal ini penyuluhan dan pelatihan pertanian oleh petani, selain membantu pelaksanaan penyuluhan pertanian kelembagaan juga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan ide-ide petani.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan kemandirian masyarakat, serta mempengaruhi

aktivitas petani padi, memfokuskan beberapa kebijakan, yaitu: a) Peran Pemerintah sebagai fasilitator, dalam memberdayakan dan mempengaruhi petani padi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berbagai bentuk dan model pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah seperti sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan (pendampingan) dalam kegiatan pertanian; b) Peran Pemerintah sebagai dinamisator Peran pemerintah sebagai dinamisator sangat mempengaruhi petani dalam aktivitas pertaniannya, pemerintah membentuk kelompok tani yang dinaungi oleh lembaga pertanian di desa yaitu GAPOKTAN untuk mengelola aktivitas kelompok tani yang berhubungan dengan penyaluran bantuan pertanian, sehingga memudahkan masyarakat memperoleh bantuan yang diinginkan; c) Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pembuatan kebijakan, dalam hal ini kegiatan pemberdayaan pertanian sebenarnya sangat jelas system dan aturannya, namun kondisi masyarakat

yang masih awam dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan penalaran dan teknologi, menghambat laju pemberdayaan pertanian masyarakat karena melihat kondisi pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih di bawah rata-rata.

Faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur adalah a) Faktor Sikap Mental, karena tingkat pendidikan petani yang masih rendah mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya diri mengikuti penyuluhan, pelatihan maupun sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah, b) Faktor Permodalan, Pemerintah telah memberikan bantuan berupa modal, pupuk, serta alat pertanian modern, c) Faktor Pemasaran, Hasil produksi padi masih dikuasai oleh tengkulak karena Pemerintah yang tidak ikut campur memberi harga, d) Faktor Kelembagaan, dengan adanya kelembagaan GAPOKTAN, sangat membantu masyarakat petani dalam memperoleh informasi pertanian serta

mendapatkan bantuan langsung dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhawati . 2015. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongki Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi . Makassar: Unismuh Makassar
- Adi, Isbandi Rukminto, 2013. *Intervensi komunitas dan pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Mangowal, Jack. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan*. ejournal.unsrat. Diunduh 14 januari 2015.
- Joko Sarjono, Joni & dkk. 2014. *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Tirnur*. Jurnal Tesis PMIS. UNTAN PSS 2014. Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presfektif*

Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta. CV.

Ndraha, Talizidhu. 2003. *Metodologi
Pemerintahan Indonesia*,
Jakarta: Bina Aksara.

Siagian, Sondang P. 2003.
*Administrasi Pembangunan
(Konsep, dimensi dan
strateginya)*. Jakarta: Bumi
Aksara.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004.
*Kemitraan dan Model-Model
Pemberdayaan*. Yogyakarta:
Gava Media.

Soetomo. 2013. *Strategi-strategi
Pembangunan Masyarakat*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

.